KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.1 NOMOR : 2 0 H.2 X Pembetulan Ke-	0 0 0 0 0 6 0 9 0 H.3 Pembatala	n		Final Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAI	N YANG DIPOTONG			•		
A.1 NPWP : 7 9 8 9 3	3 2 3 1 5 7	2 4 0 0 0				
A.2 NIK :						
A.3 Nama : JAUHARIYATUL A	ANWARIYAH, AMD. KEP.					
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG						
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
1 21-402-01	7.640.800	7.640.800	0	5	382.040	
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal Z 5 dd D 2 mm Z 0 2 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: Tanggal Dekumen Referensi : Nomor Dokumen Faktur Pajak Tanggal D dd Mm Wyyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK						
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : C.2 Nama Instansi Pemerintah : C.3 ID Subunit Organisasi : C.4 Tanggal : C.5 Nama Penandatangan : C.6 Pernyataan Wajib Pajak :	2 6 dd 0 1 mm HARI JUMADI Dengan ini saya menyatakan batandatangani secara elektronik.	RAH ATMA HUSADA MAHAK. 2 0 2 2 yyyyy ahwa bukti Pemotongan/Pemungut	an Unifikasi telah s	aya isi dengan	benar dan telah saya	

KZVDZ8QT